

**ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN PAJAK, PENGELUARAN  
PEMERINTAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**IBRAHIM WIRA SANJAYA**

**2017/17060069**

**Ilmu Ekonomi**

**Fakultas Ekonomi**

**Universitas Negeri Padang**

**2021**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN PAJAK, PENGELUARAN  
PEMERINTAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Nama : Ibrahim Wira Sanjaya

TM/NIM : 2017/17060069

Keahlian : Ekonomi Publik

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Mengetahui,

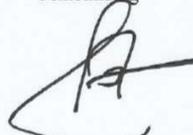
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, S.E., M.E  
NIP.19830505 200604 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pembimbing



Drs. Ali Anis, MS  
NIP.19591129 198602 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN PAJAK, PENGELUARAN  
PEMERINTAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

**Nama : Ibrahim Wira Sanjaya**  
**TM/NIM : 2017/17060069**  
**Jurusan : Ilmu Ekonomi**  
**Keahlian : Ekonomi Publik**  
**Fakultas : Ekonomi**

**Padang, November 2021**

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Drs. Ali Anis, Ms	1. 
2	Anggota	: Dr. Novya Zulva Riani, SE, M. Si	2. 
3	Anggota	: Dewi Zaini Putri, S.E, MM	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ibrahim Wira Sanjaya  
NIM / Tahun Masuk : 17060069/2017  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang, 7 Desember 1999  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Cendana Mata Air, Tahap 06 blok Q nomor 06,  
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.  
No. HP / Telepon : 081275343610  
Judul Skripsi : ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN  
PAJAK, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 3 November 2021

Yang menyatakan



Ibrahim Wira Sanjaya

NIM. 17060069

## ABSTRAK

**Ibrahim Wira Sanjaya (17060069/2017): Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Dibawah Bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, MS**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia; (2) Hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia; (3) Hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif, dimana data yang digunakan ialah data sekunder berupa *time series* di Indonesia dari tahun 1980 sampai 2019 yang didapatkan dari lembaga dan instansi terkait. Dalam penelitian ini menggunakan model *Vector Autoregression (VAR)* yang dilanjutkan dengan model *Vector Error Correction Model (VECM)* dengan uji kausalitas menggunakan *Granger Causality Test* dan uji kointegritas penelitian ini menggunakan *Johansen Cointegration Test*.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia; (2) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, namun terdapat kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah di Indonesia; (3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi, namun terdapat kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada penerimaan pajak di Indonesia

**Kata Kunci** : Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, *Granger Causality Test*.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Alianis, MS, selaku pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Teristimewa kepada Orang Tua tercinta, terutama Mama, Ayah, kakak, adikku dan keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, bantuan materi, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Melti Roza Adry, SE. ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE. MM selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE, M. Si dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM selaku Dosen Penguji pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi tercinta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapat referensi.
7. Kepada Tayo Squad (Yohadi, Putra, Panji, Agung, dan Kristoper) yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada DARAWET (Rais, Gamis, Isa, dan Melvi) yang selalu memberikan *support* dan memberikan tempat untuk menghibur diri dalam melalui lika dan liku menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh kawan-kawan Konsentrasi Ekonomi Publik angkatan 2017 yang telah mendukung memberi semangat dan membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada Keluarga Ilmu Ekonomi 2017 yang telah sama-sama berjuang sejak awal hingga sekarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu

intinya terimakasih banyak atas bantuan dan partisipasinya dalam penulisan skripsi saya selama ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua Amin.

Padang, November 2021

Penulis,

Ibrahim Wira Sanjaya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN     HIPOTESIS .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>10</b>
1. Pajak .....	10
2. Pengeluaran Pemerintah .....	14
3. Pertumbuhan Ekonomi .....	21
4. Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak Dengan Pengeluaran Pemerintah .....	24
5. Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	26
6. Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak Dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	27
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Hipotesis .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>B. Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Jenis Data dan Sumber Data.....</b>	<b>36</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>E. Defenisi Operasional .....</b>	<b>37</b>
<b>F. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>38</b>
1. Analisis Deskriptif.....	38
2. Analisis Induktif.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....</b>	<b>46</b>
1. Kondisi Geografis Indonesia .....	46
2. Kondisi Penduduk Indonesia.....	47
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>49</b>
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	49
2. Analisis Induktif .....	54
3. Pengujian Hipotesis .....	76
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>79</b>
1. Kausalitas antara Penerimaan Pajak dengan Pengeluaran Pemerintah ..	79
2. Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	82

3. Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dengan Pertumbuhan Ekonomi	.85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan</b>	89
<b>B. Saran</b>	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 4.1: Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2013-2019.....	48
Tabel 4.2: Hasil Uji Stasioneritas .....	54
Tabel 4.3: Hasil Uji Lag Optimum .....	55
Tabel 4.4: Hasil Uji Stabilitas VAR.....	56
Tabel 4.5: Hasil Uji Kointegrasi Variabel Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi .....	57
Tabel 4.6: Hasil Uji Kausalitas Granger .....	58
Tabel 4.7: Hasil Estimasi VECM Variabel Penerimaan Pajak Jangka Panjang ...	60
Tabel 4.8: Hasil Estimasi VECM Variabel Penerimaan Pajak Jangka Pendek ....	60
Tabel 4.9: Hasil Estimasi VECM Variabel Pengeluaran Pemerintah Jangka Panjang .....	63
Tabel 4.10: Hasil Estimasi VECM Variabel Pengeluaran Pemerintah Jangka Pendek .....	64
Tabel 4.11: Hasil Estimasi VECM Variabel Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang .....	67
Tabel 4.12: Hasil Estimasi VECM Variabel Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek .....	67
Tabel 4.13: Hasil Uji Variance Decomposition .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: GDP Atas Harga Berlaku Indonesia dari Tahun 1980-2019.....	4
Gambar 1.2: Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia dari Tahun 1980-2019 (Milyar Rupiah).....	6
Gambar 2.1: Dampak Perubahan Penetapan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	14
Gambar 2.2: The median voter demand model.....	17
Gambar 2.3: The service environment and productivity differential models .....	18
Gambar 2.4: Hukum Wagner .....	24
Gambar 2.5: Kerangka Konseptual Hubungan Antara Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	34
Gambar 4. 1: Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia dari Tahun 1980-2019 ...	50
Gambar 4.2: Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia dari Tahun 1980-2019 .....	51
Gambar 4.3: GDP Atas Harga Belaku di Indonesia dari Tahun 1980-2019 .....	52
Gambar 4. 4: Hasil Uji IRF.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Variabel Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1980-2019 .....	96
Lampiran 2. Uji Akar Unit Variabel Penerimaan Pajak .....	97
Lampiran 3. Uji Akar Unit Variabel Pengeluaran Pemerintah .....	98
Lampiran 4. Uji Akar Unit Variabel Pertumbuhan Ekonomi .....	99
Lampiran 5. Estimasi VECM Variabel Penerimaan Pajak .....	100
Lampiran 6. Estimasi VECM Variabel Pengeluaran Pemerintah .....	101
Lampiran 7. Estimasi VECM Variabel Pertumbuhan Ekonomi .....	103
Lampiran 8. Tabel Uji t-statistik/ Titik Persentase Distribusi .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama negara berkembang agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia termasuk kedalam kategori negara berkembang yang berdasarkan publikasi *World Bank* pada tahun 2019 Indonesia termasuk kedalam kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (*upper middle income country*) dengan GNI per kapita sebesar 4,050 USD di atas batas bawah yang ditetapkan *World Bank* yaitu sebesar 4,046 USD. Salah satu masalah utama yang harus dihindari oleh perekonomian Indonesia adalah *middle income trap* yang membuat perekonomian akan sulit tumbuh dan usaha dalam mencapai status negara berpendapatan tinggi akan menjadi terhambat. Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi *lower middle income country* selama 23 tahun dan baru menjalani sebagai *upper middle income country* selama satu tahun, hanya sedikit negara yang dapat lolos dari *middle income trap* (Kompas, 2020).

Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk keluar dari *middle income trap* dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal. Di Indonesia sendiri kebijakan fiskal mengarah pada kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran, pendapatan serta perpajakan, dan salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal yang memiliki pengaruh besar dengan pendapatan negara (Kumparan, 2021).

Jhingan (2016) menjelaskan bahwa adanya kebijakan fiskal di negara berkembang memiliki arti penting dalam menghadapi permasalahan pembentukan modal yaitu pendapatan dan tabungan per kapita negara sangat rendah. Orang dengan pendapatan tinggi justru mengkonsumsi barang mewah dan menyalurkan pada hal yang tidak produktif dengan demikian dibutuhkan kebijakan fiskal agar mengalihkan semua ke jalur yang lebih produktif yang dalam hal ini pajak memiliki peranan penting sehingga dapat membatasi konsumsi swasta dan difokuskan untuk pembentukan modal pemerintah. Modal yang diperoleh dari penarikan pajak akan disalurkan untuk membiayai program pembangunan ekonomi dan investasi publik yang lebih baik. Dalam hal ini, adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi akan membuat pemerintah berusaha menstabilkan dengan merubah penerimaan pajak agar lebih produktif. Sedangkan menurut Sudirman (2011) penerimaan pajak memiliki hubungan kepada pertumbuhan ekonomi dimana ketika adanya perubahan pada tarif pajak akan mempengaruhi masyarakat sebagai objek pajak, perubahan tarif pajak menyebabkan perubahan pada pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga akan mempengaruhi pendapatan nasional.

Hubungan kausalitas penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui hasil penelitian Maganya (2020) bahwa adanya hubungan dua arah tersebut menyebabkan pemerintah harus lebih memperhatikan struktur pajak agar dapat lebih efisien sehingga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan dalam hal ini masyarakat harus membayar kepada pemerintah dalam bentuk pajak atas berbagai manfaat yang diterima dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Tanzania.

Dalam kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah juga menjadi perhatian penting dalam usaha pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Keynes dalam model identitas pendapatan nasional yang dilihat dari sisi pengeluaran menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga dan investasi yang menggambarkan permintaan memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional pada model yang dikenal dengan identitas pendapatan nasional, dengan begitu dapat diketahui kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (Dumairy, 1996). Sedangkan hasil penelitian Wagner pada abad ke-19 menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah melalui hukum yang dinamakan *law of ever increasing state activity* dimana dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat dan hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 2001).

Penelitian Irandoust (2019) menjelaskan bahwa pada 12 negara yang tergabung dalam OECD terdapat kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara Spanyol dan Italia, hal ini mendukung hukum Wagner dan hipotesis Keynes secara bersamaan.

Berikut data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan *Gross Domestic Product* (GDP) atas harga berlaku dalam satuan rupiah dari tahun 1980-2019:



**Gambar 1.1: GDP Atas Harga Berlaku Indonesia dari Tahun 1980-2019**

*Sumber : World Bank (data diolah)*

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada GDP atas harga berlaku di Indonesia dalam kurun waktu empat puluh tahun. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia dimana secara riil GDP jauh menurun, namun secara nominal meningkat drastis karena harga yang meningkat jauh akibat dorongan inflasi. Pada tahun 2008 sempat terjadi gejolak ekonomi di berbagai belahan dunia namun tidak terlalu berdampak ke Indonesia. Pada tahun 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun daya tahan perekonomian Indonesia cenderung stabil walau berada di tengah gejolak ekonomi global (Kemenkeu, 2017).

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pemerintah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pengeluaran pemerintah guna

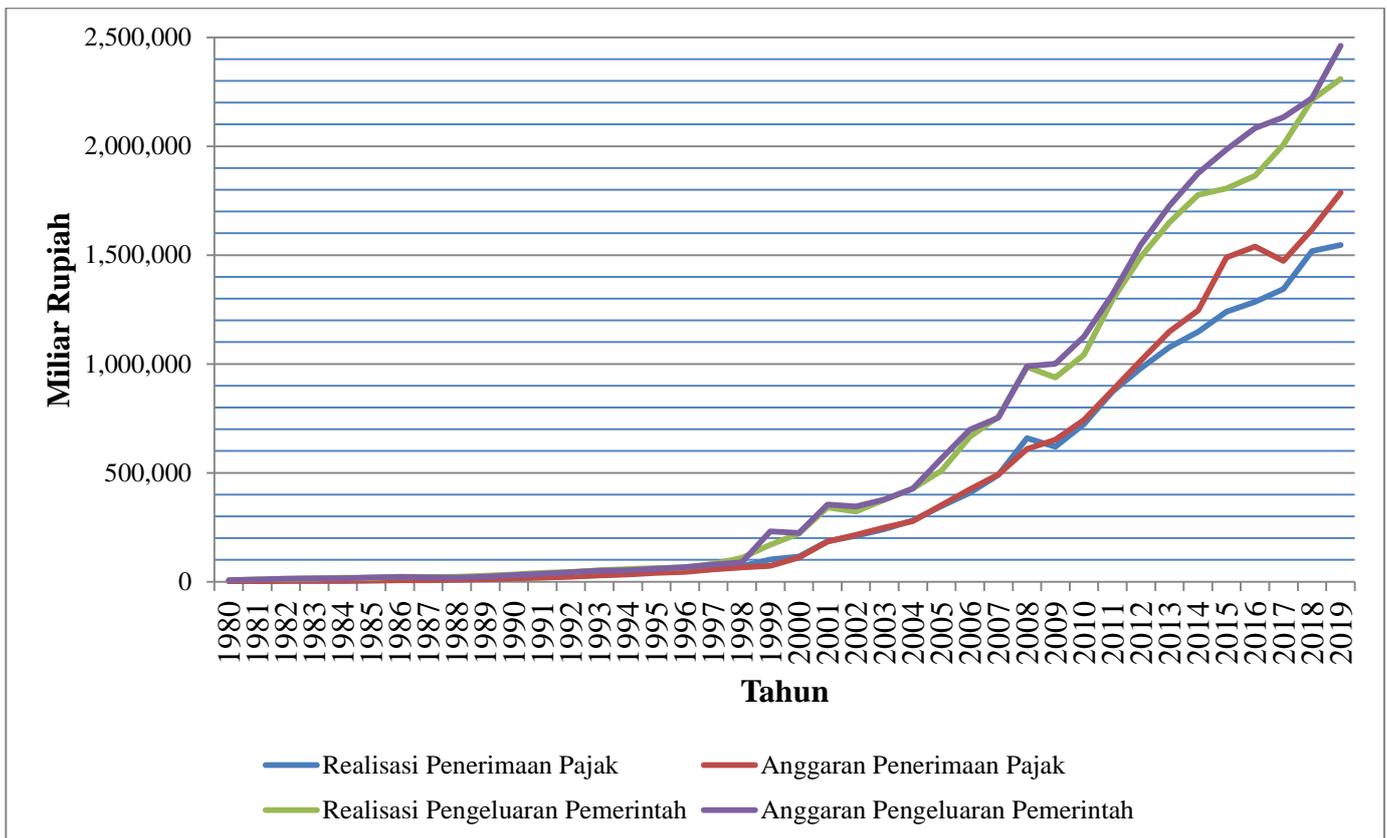
menjalankan kebijakan pendukung pertumbuhan ekonomi. Jhingan (2016) menyatakan bahwa pada negara berkembang terdapat perbedaan kesejahteraan dan pendapatan yang tinggi karena itu dibutuhkan pengeluaran pemerintah untuk menurunkan perbedaan yang ada. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan akan membantu dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga memberikan peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan daya beli sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dalam kebijakan fiskal, penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah sebagai instrumen memiliki hubungan yang kuat dimana menurut teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (1961) masyarakat yang mempunyai batas toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat memahami bahwa besarnya pemungutan pajak dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah namun menjadi penghambat bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peacock dan Wiseman juga menyimpulkan bahwa pada keadaan normal, peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan pungutan pajak sebagai penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Jika terdapat gangguan seperti terjadinya perang, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluaran guna menyelesaikan gangguan tersebut dan berdampak pada peningkatan pungutan pajak kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran atas gangguan yang terjadi (Dumairy, 1996).

Musgrave (1966) memberikan pendapat yang sejalan dengan teori Peacock dan Wiseman dimana salah satu fungsi kebijakan anggaran (*budget policy*) adalah

ketika pemerintah harus menyediakan kebutuhan sosial sehingga pemerintah harus mengenakan pajak atas pengeluaran barang dan jasa yang disediakan.

Berikut realisasi dan anggaran pengeluaran pemerintah di Indonesia dari tahun 1980 – 2019:



**Gambar 1.2: Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia dari Tahun 1980-2019 (Miliar Rupiah)**

**Sumber** : *Kementerian Keuangan (data diolah)*

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran pemerintah dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam empat puluh tahun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan terjadi peningkatan drastis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam usaha peningkatan sektor ekonomi dengan melaksanakan berbagai program. Dari segi ekonomi, Pemerintah melakukan pengeluaran dalam bentuk

pembangunan infrastruktur ataupun biaya lainnya dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menstabilkan perekonomian.

Jhingan (2004) menjelaskan kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi memiliki tujuan yang salah satunya untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional agar tercapai keadilan ekonomi, yaitu setiap individu dan golongan dalam masyarakat dapat menikmati hasil – hasil kegiatan ekonomi secara merata. Alat kebijakan fiskal yang bisa digunakan salah satunya adalah melakukan pembelanjaan yang sifatnya membantu golongan masyarakat miskin berupa bantuan keuangan (subsidi) sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik (Wahyuningsih, 2020).

Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga berusaha meningkatkan penerimaan yang salah satunya melalui pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dan menstabilkan perekonomian. Taha dan Loganathan (2008) yang meneliti hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Malaysia pada periode tahun 1970-2006 dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah yang kuat antara variabel penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Malaysia.

Gambaran data yang sudah perlihatkan pada gambar 1.1 dan 1.2 memperlihatkan eksisnya pola hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah. Pada sisi lain juga terlihat pola hubungan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah. Atas dasar fakta inilah Penulis tertarik untuk mengkaji pola hubungan tersebut dengan judul **“Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia?
2. Apakah terdapat kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Apakah terdapat kausalitas antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kausalitas antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas dapat diperoleh kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu ekonomi publik, ekonomi makro, teori penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi pengambil kebijakan yaitu Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan, dan Dirjen Pajak.

3. Bagi penelitian lebih lanjut yang meneliti tentang penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
4. Bagi Peneliti dalam rangka mencapai sarjana ekonomi pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pajak

Dalam menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah harus memperhatikan *public finance* guna mendukung program yang sudah direncanakan. Dalton mendefinisikan *public finance* merupakan sebuah ilmu yang fokus membahas pada penerimaan dan pengeluaran otoritas publik atau pemerintah yang berperan untuk menggerakkan sumber daya melalui pajak, pinjaman dan lainnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan yang diinginkan. Salah satu fokus dari *public finance* adalah *public revenue* atau penerimaan pemerintah. Menurut Dalton terdapat dua jenis penerimaan pemerintah yaitu penerimaan dari pajak serta barang dan jasa perusahaan negara serta pendapatan dari kegiatan administratif seperti denda, hadiah dan hibah (Dalton, 2003).

Noor (2015) menyatakan bahwa penerimaan atau pendapatan negara merupakan sumber dalam rangka membiayai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana kemampuan negara dalam membiayai dirinya sangat ditentukan oleh sumber penerimaan negara yang ditentukan oleh undang – undang. Pendapatan negara dapat dibagi menjadi dua sumber yaitu sumber utama pendapatan negara berupa pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, dan keuntungan dari percetakan uang (*Seigniorage*), sumber ke dua adalah sumber pendapatan negara lainnya berupa sumbangan masyarakat atas jasa yang diberikan pemerintah, hibah masyarakat dari dalam dan luar negeri, serta hadiah.

Noor (2015) juga menjelaskan bahwa pajak sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan negara dapat dibagi menjadi dua kategori yakni pajak langsung (*Direct Tax*) merupakan pajak yang tanggungannya tidak dapat dipindahkan ke orang lain, contohnya adalah pajak pendapatan (gaji), pajak kekayaan dan pajak perseorangan. Kategori ke dua adalah pajak tidak langsung (*Indirect Tax*) merupakan pajak yang beban tanggungannya dapat dipindahkan kepada orang lain, contohnya adalah pajak pertambahan nilai, bea materai, cukai dan bea masuk barang impor serta bea balik nama kendaraan dan lain-lain.

Bailey (1995) berpendapat bahwa perpajakan dapat digunakan untuk tujuan efisiensi dan kesetaraan serta untuk membiayai dalam sistem demokrasi. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan dapat mencegah konsumsi komoditas yang menghasilkan eksternalitas negatif, untuk menstabilkan pendapatan nasional dan untuk mendistribusikan pendapatan serta kekayaan.

Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat berdasarkan undang – undang yang bersifat memaksa tanpa jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang digunakan untuk membiayai public investment (Resmi, 2016). Sedangkan menurut UU nomor 9 tahun 2020 tentang APBN menjelaskan bahwa penerimaan perpajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Resmi (2016) membedakan fungsi pajak menjadi dua yaitu fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) yakni pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Hal

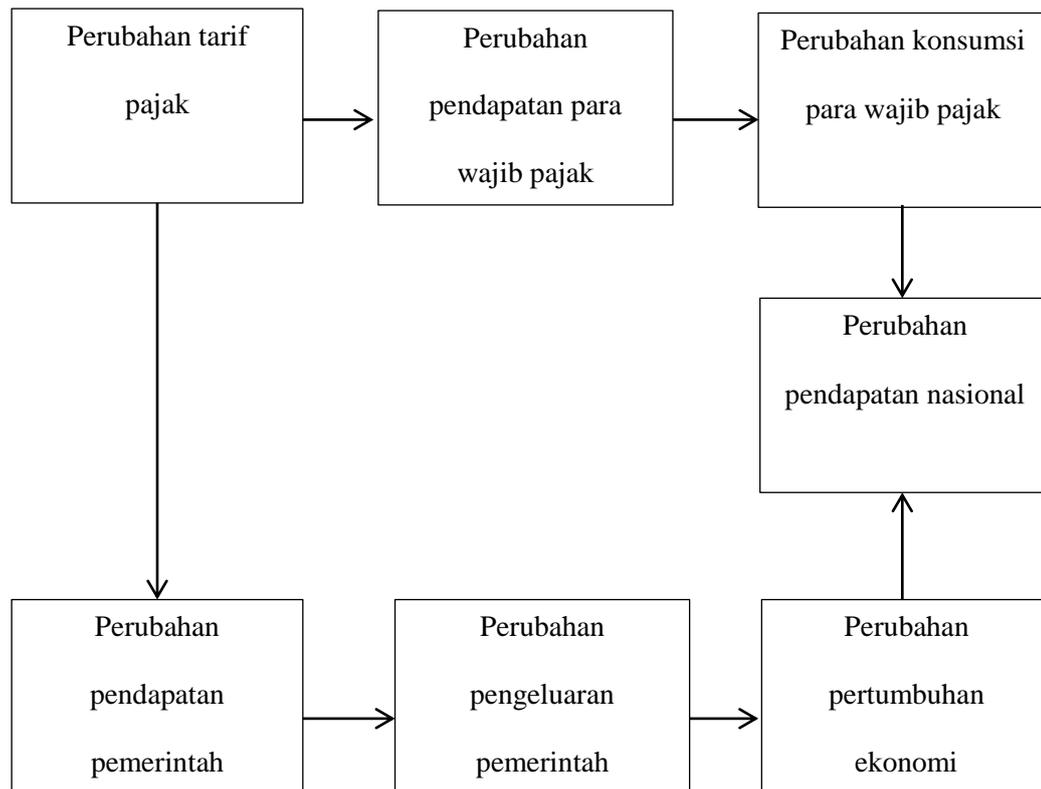
ini dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi *Regularend* (pengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Peacock dan Wiseman (1961) mengemukakan teori tentang hubungan penerimaan pajak dari masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang mendasari bahwa pemerintah selalu berusaha meningkatkan pengeluaran dengan mengandalkan penerimaan pajak, namun masyarakat tidak suka peningkatan pajak oleh pemerintah. Dalam kondisi ini, masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat memahami bahwa besarnya pemungutan pajak dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah namun menjadi penghambat bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peacock dan Wiseman juga menyimpulkan bahwa pada keadaan normal, peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan pungutan pajak sebagai penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Jika terdapat gangguan seperti terjadinya perang, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluaran guna menyelesaikan gangguan tersebut dan berdampak pada peningkatan pungutan pajak kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran atas gangguan yang terjadi (Dumairy, 1996).

Jhingan (2016) menjelaskan bahwa pajak dalam kebijakan fiskal di negara berkembang memiliki arti penting dalam menghadapi permasalahan pembentukan modal yaitu pendapatan dan tabungan per kapita negara sangat rendah. Orang dengan pendapatan tinggi justru mengkonsumsi barang mewah dan menyalurkan

pada hal yang tidak produktif dengan demikian dibutuhkan kebijakan fiskal agar mengalihkan semua ke jalur yang lebih produktif yang dalam hal ini pajak memiliki peranan penting sehingga dapat membatasi konsumsi swasta dan difokuskan untuk pembentukan modal pemerintah. Modal yang diperoleh dari penarikan pajak akan disalurkan untuk membiayai program pembangunan ekonomi dan investasi publik yang lebih baik.

Sudirman (2011) menyatakan bahwa pajak dalam kebijakan fiskal menjadi penting karena penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib pajak akan menyebabkan peningkatan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat adalah karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Berikut gambar 2.1 yang menjelaskan dampak perubahan penetapan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan nasional:



**Gambar 2.1: Dampak Perubahan Penetapan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

**Sumber** : I Wayan Sudirman.2011

## 2. Pengeluaran Pemerintah

Bailey (1995) mengelompokan pengeluaran real pemerintah menjadi 2 kategori utama yaitu *exhaustive expenditure* yang mengarah pada belanja pemerintah kepada hal yang bersifat pelengkap, yang termasuk *exhaustive expenditure* berupa tenaga kerja untuk menyediakan barang dan jasa dari segi input, keamanan dan tenaga kebersihan. Sedangkan *transfer payment /expenditure* yaitu pengeluaran berupa subsidi pada perusahaan swasta seperti pemberian bantuan untuk mendorong investasi, pembayaran bunga, jaminan pinjaman, bantuan luar negeri, hingga tunjangan pengangguran.

Wahyuningsih (2020) Mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan sebuah bentuk campur tangan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta dan untuk menjamin

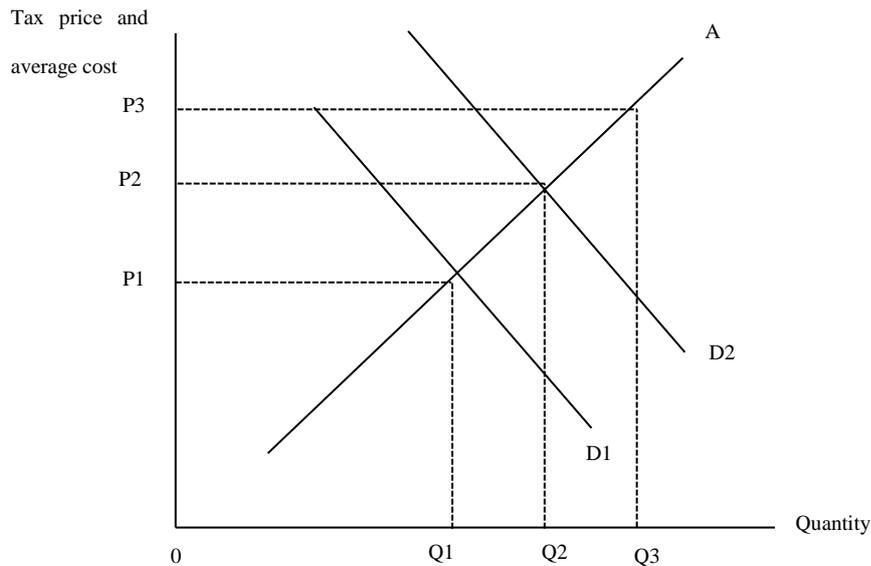
distribusi kekayaan yang adil. Sedangkan pada negara yang sedang berkembang kegiatan pemerintah pada umumnya akan selalu meningkat karena pemerintah menjadi pelopor dan pengendali pembangunan.

Menurut Mangkoesoebroto (2001) Menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan pemerintah sehingga jika pemerintah sudah membuat suatu kebijakan untuk membeli barang maupun jasa maka pengeluaran pemerintah merupakan bentuk biaya yang dialokasikan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Bailey (1995) menjelaskan bahwa dalam teori pertumbuhan pengeluaran publik (*theory of public expenditure growth*) terdapat 2 model yang dikemukakan yaitu model mikro dan makro yaitu pada model makro terdapat: (1) *Development Model* yaitu model yang memiliki kaitan dengan model yang dikemukakan Rostow dan Musgrave yaitu dalam pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah menjadi syarat penting karena pada sektor publik akan menyediakan infrastruktur seperti jalan raya, pasokan air dan sanitasi, rel kereta api. Sedangkan pada tahap selanjutnya investasi sektor publik berfokus pada peningkatan sumber daya manusia seperti bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. (2) *Organic State Model*, model ini memiliki kaitan dengan model wagner. Negara diasumsikan tumbuh seperti organisme dimana negara akan membuat keputusan atas kepentingan masyarakat. Adanya tuntutan dari masyarakat seperti layanan kesehatan dan pendidikan tumbuh lebih cepat daripada pendapatan per kapita namun manifestasi atas kegagalan pasar juga membutuhkan intervensi pemerintah berupa subsidi atau pemberian langsung untuk memberikan layanan kepada individu dalam jumlah optimal secara ekonomi. (3) *Political Constraints Model*,

merupakan model yang memiliki kaitan dengan model yang dikemukakan Peacock dan Wiseman (1961) yaitu pemerintah memilih untuk meningkatkan pengeluaran tetapi dibatasi oleh wajib pajak yang dilakukan melalui demokrasi saat pemilu. Perolehan tarif pajak yang dapat ditoleransi meningkatkan pendapatan pajak bila diterapkan pada pertumbuhan pribadi serta pendapatan dan pengeluaran perusahaan. (4) *Leviathan Model*, model ini mengasumsikan kendala politik pada pertumbuhan pengeluaran publik yang terbatas. Pemerintah berusaha mencari pertumbuhan yang akan menguntungkan mereka yang berkeja di sektor publik daripada interest publik, karena itu sektor publik menjadi mandiri dan tumbuh seperti *leviathan* atau monster.

Sedangkan pada model mikro bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang secara langsung mempengaruhi permintaan maupun penawaran output sektor publik karena itu dapat menjelaskan perubahan dalam pengeluaran publik. Pada model mikro terdapat *Median Voter Model* yang berlawanan dengan model makro dimana model ini mengasumsikan bahwa pemilih memiliki preferensi untuk campur tangan pada hal tertentu dan pada tingkat pelayanan sektor publik. Dalam hal ini beberapa variabel yang dapat mempengaruhi permintaan adalah *median voter*, total populasi dan struktur demografi. Berikut gambar yang dapat menjelaskan model *the median voter* dari sisi permintaan:



**Gambar 2.2: The median voter demand model**  
**Sumber : Stephen J Bailey.1995**

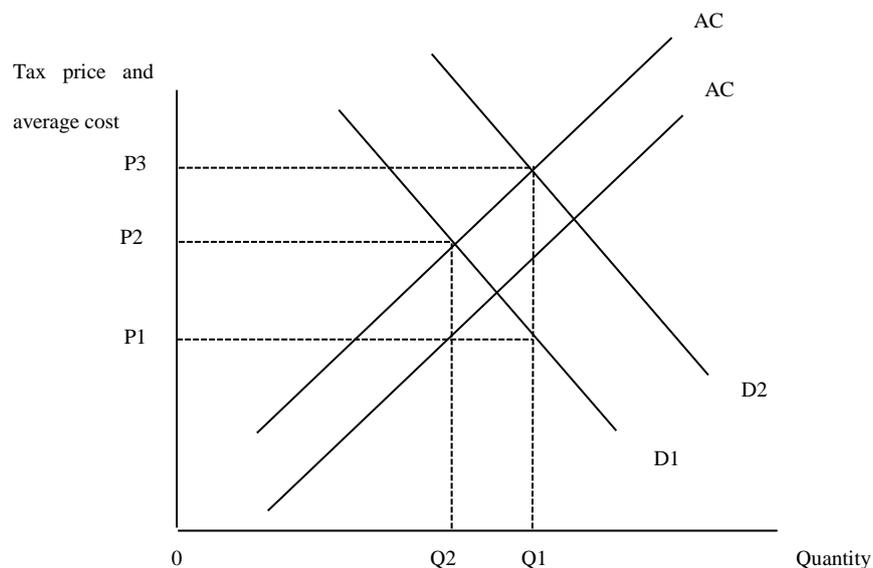
Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan mengenai *the median voter* yaitu belanja publik awalnya  $p_1q_1$ , berasal dari perpotongan  $D_1$  dan  $AC$  di mana permintaan sama dengan penawaran. Jika median pendapatan setelah pajak dari pemilih naik, kurva permintaan bergeser ke kanan ke  $D_2$ , menunjukkan bahwa pada harga  $p_1$ , permintaan meningkat ke  $q_3$ . Semakin besar elastisitas pendapatan dari permintaan untuk layanan sektor publik tertentu, semakin besar pergeseran ke kanan. Namun negara tidak akan memberikan  $q_3$  karena kesediaan untuk membayar ( $p_1$ ) lebih kecil dari harga pajak,  $p_3$ . Oleh karena itu, ekuilibrium baru adalah  $p_2q_2$ , di mana harga pajak sama dengan biaya rata-rata. Oleh karena itu, belanja publik meningkat dari  $p_1q_1$  menjadi  $p_2q_2$ .

Dampak perubahan jumlah penduduk tergantung pada karakteristik ekonomi komoditas sektor publik seperti barang *private* murni yakni output biasanya akan meningkat secara proporsional kepada penduduk karena hak milik eksklusif mereka, Barang publik murni yang outputnya sama sekali tidak perlu ditingkatkan karena karakteristik *non-rivalness* dan barang publik (campuran) yang tidak murni

yakni peningkatan yang kurang dari proporsional output biasanya akan dibutuhkan karena campuran mereka dari karakteristik *non-eksklusif* tetapi rival.

Sedangkan pada struktur demografi ketika meningkat jumlah penduduk lansia maka akan meningkat tuntutan akan perawatan kesehatan dan pelayanan sosial pribadi sedangkan kenaikan jumlah penduduk anak-anak maka akan meningkatkan tuntutan pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Pada faktor sisi supply, variabel akan berkaitan dengan lingkungan tempat jasa di produksi, kualitas barang yang diproduksi, dan produktivitas input yang digunakan dalam penyediaan mereka.



**Gambar 2.3: The service environment and productivity differential models**

**Sumber : Stephen J Bailey.1995**

Lingkungan tempat jasa diproduksi yang memburuk membutuhkan lebih banyak input untuk standar output tertentu apakah komoditas yang dimaksud adalah barang pribadi murni, barang campuran, atau barang publik murni dengan pergeseran dari AC1 ke AC2. Abaikan D2 untuk saat ini karena kondisi permintaan diasumsikan tetap konstan. Pajak biaya penyediaan output yang sama

(q1) naik dari p1q1 ke p3q1. Namun secara normal, kenaikan biaya pajak akan mengurangi median permintaan pemilih untuk q2 (yaitu tetap pada D1) sehingga pengeluaran publik meningkat dari p1q1 ke p2q2.

Sedangkan pada kualitas pelayanan, kualitas yang lebih tinggi biasanya membutuhkan level pengeluaran yang lebih tinggi untuk volume layanan tertentu. Analisis serupa dengan model lingkungan layanan dan diwakili oleh pergeseran ke atas kurva AC. Merujuk pada peningkatan pengeluaran publik, jika ada harapan untuk terus meningkatkan kualitas peneluaran sektor publik seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, maka pengeluaran akan terjadi peningkatan seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir adalah produktivitas dari input, yakni Pada umumnya saat produktivitas masyarakat semakin rendah pada sektor input maka semakin besar pengeluaran yang diperlukan untuk memberikan tingkat atau kualitas layanan. Sering diklaim bahwa faktor produksi digunakan pada tingkat efisiensi yang lebih rendah di sektor publik daripada di sektor swasta karena inefisiensi manajemen pada sebelumnya (Bailey, 1995).

Sedangkan dalam cakupan makro, Rostow dan Musgrave mengembangkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan pengeluaran pemerintah menjadi tiga tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Tahap awal, pada tahap ini untuk memajukan perekonomian membutuhkan investasi besar sehingga pemerintah mengambil peran penyedia prasarana seperti kesehatan, pendidikan transportasi dan sebagainya. Tahap menengah, pada tahap ini peran investasi dari pemerintah masih dibutuhkan agar memudahkan perekonomian mencapai tahap tinggal landas, namun pada tahap ini peran

investasi swasta sudah membesar sehingga menimbulkan kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dengan kualitas yang lebih baik dan dalam jumlah yang lebih banyak. Tahap lanjut, pada tahap ini peran pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti program pelayanan kesehatan, program jaminan pendidikan dan kesejahteraan hari tua (Mangkoesobroto, 2001).

Model tersebut sesuai dengan pendapat Due (1984) yang menyatakan bahwa pemerintah bisa memiliki pengaruh terhadap tingkat PDB real dengan merubah persediaan berbagai faktor yang digunakan dalam kegiatan produksi melalui program pengeluaran pemerintah seperti pendidikan (Wahyuningsih, 2020).

Musgrave (1966) menyatakan pendapat bahwa terdapat 3 keutamaan pada kebijakan anggaran (*budget policy*) oleh pemerintah yaitu (1) Penyediaan kebutuhan sosial, yang mengharuskan Pemerintah untuk mengenakan pajak dan melakukan pengeluaran untuk barang dan jasa; (2) Penerapan ukuran tertentu terhadap distribusi pendapatan sebagaimana ditentukan di pasar yang mengharuskan Pemerintah untuk menambah pendapatan sebagian melalui transfer sekaligus mengurangi pendapatan orang lain dengan pajak; (3) Penggunaan kebijakan anggaran untuk tujuan stabilisasi ekonomi, sehingga dalam beberapa kondisi diperlukan untuk menaikkan tingkat permintaan dengan kebijakan defisit dan dalam kondisi lain untuk mengurangi permintaan dengan kebijakan surplus.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Todaro dan Smith (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk usaha untuk memperoleh tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memproduksi output lebih cepat dari pada laju pertumbuhan penduduk atau dapat diartikan sebagai seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia yang digunakan sebagai konsumsi dan investasi oleh rata-rata masyarakat. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto per kapita “riil” digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan ekonomi seluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran atas ekspansi GDP potensial atau output nasional suatu negara dengan artian lain pertumbuhan ekonomi terjadi jika batas kemungkinan produksi (*production-possibility frontier*/PPF) masyarakat bergeser ke luar. Sedangkan konsep yang berkaitan erat adalah tingkat pertumbuhan per orang yang menentukan tingkat ketika standar hidup negara naik serta negara menaruh perhatian pada pertumbuhan output per kapita karena dapat menyebabkan peningkatan rata-rata pendapatan (Samuelson dan Nordhaus, 1999).

Definisi tersebut dikuatkan oleh Simon Kuznets, menurutnya pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam rangka menyediakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya yang tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi yang disampaikan Kuznets memiliki 3 Komponen yakni peningkatan persediaan barang secara terus-menerus akan memperlihatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, Dalam

pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan faktor kemajuan teknologi untuk menentukan tingkat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan barang kepada masyarakat dan perlunya penyesuaian dalam bidang kelembagaan dan ideologi dalam rangka membantu penggunaan teknologi secara luas dan efisien sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan tepat (Jhingan, 2016).

Berdasarkan teori yang dikemukakan Kuznets (1971) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro dan Smith, 2009).

Keynes dalam model identitas pendapatan nasional yang dilihat dari sisi pengeluaran menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga dan investasi yang menggambarkan permintaan memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional pada model yang dikenal dengan identitas pendapatan nasional, dengan begitu dapat diketahui kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (Dumairy, 1996). Model identitas pendapatan nasional dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + X - M$$

Y : Pendapatan nasional

C : Konsumsi rumah tangga

I : Investasi Perusahaan

G : Pengeluaran pemerintah

X-M: Ekspor-Import

Menurut pendapat Adolf Wagner menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yakni mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Secara relatif, pengeluaran pemerintah dijelaskan dalam hukum Wagner adalah dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (*law of ever increasing state activity*) (Mangkoesoebroto, 2001).

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

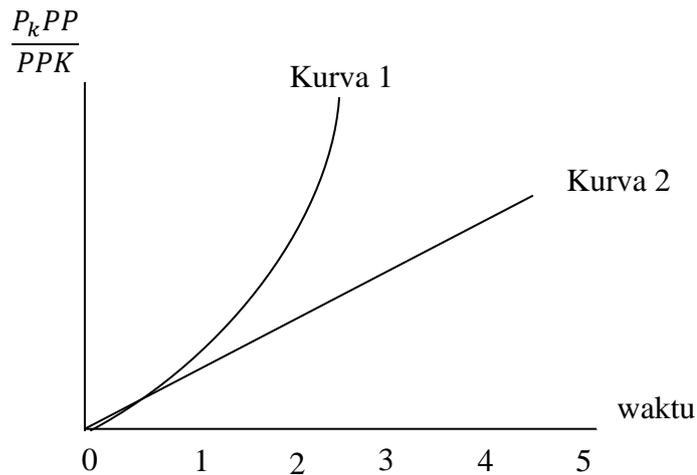
$$\frac{P_K PP_1}{PPK_1} < \frac{P_K PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_K PP_n}{PPK_n}$$

$P_K PP$  : Pengeluaran pemerintah per kapita

$PPK$  : pendapatan per kapita atau GDP/jumlah penduduk

1,2,...n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner dapat digambarkan dalam diagram yaitu ketika kenaikan pengeluaran pemerintah memiliki bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan berbentuk seperti kurva 2.



**Gambar 2.4: Hukum Wagner**

*Sumber : Mangkoesoebroto, 2002*

Wagner juga menjelaskan peningkatan tersebut terjadi akibat adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, adanya birokrasi yang tidak efisien, dan perkembangan demokrasi (Dumairy, 1996).

#### **4. Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak Dengan Pengeluaran Pemerintah**

Penerimaan pajak memiliki hubungan yang erat dengan pengeluaran pemerintah yakni ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran maka akan membutuhkan penerimaan pajak sebagai saran pembiayaan, sedangkan peningkatan penerimaan pajak juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk menjalankan berbagai kebijakan. Jhingan (2016) menyatakan bahwa di negara berkembang, pajak merupakan cara paling efisien untuk mentransfer sumber agar digunakan lebih produktif dikarenakan kebiasaan masyarakat yang menyebabkan tingkat tabungan dan investasi yang rendah sehingga pajak

diharapkan dapat menyalurkan kepada saluran yang lebih produktif sebagai investasi negara.

Peacock dan Wiseman (1961) menyatakan bahwa pada keadaan normal, peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan pungutan pajak sebagai penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Jika terdapat gangguan seperti terjadinya perang, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluaran guna menyelesaikan gangguan tersebut dan berdampak pada peningkatan pungutan pajak kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran atas gangguan yang terjadi (Dumairy, 1996). Sedangkan Musgrave (1966) memberikan pendapat yang sejalan dengan teori Peacock dan Wiseman dimana salah satu fungsi kebijakan anggaran (*budget policy*) adalah ketika pemerintah harus menyediakan kebutuhan sosial sehingga pemerintah harus mengenakan pajak atas pengeluaran barang dan jasa yang disediakan.

Taha dan Loganathan (2008) menyatakan bahwa penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas dua arah yang mendukung pernyataan tingginya kontribusi penerimaan pajak dalam membiayai pengeluaran pemerintah sehingga apabila terjadi penurunan penerimaan pajak akan menjatuhkan pengeluaran pemerintah di masa yang akan datang. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Sriyana (2009) yang menyatakan bahwa pada jangka panjang terdapat hubungan kausalitas dua arah yang sangat kuat antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah sedangkan pada jangka pendek terdapat hubungan kausalitas searah dari penerimaan pajak ke pengeluaran pemerintah dimana jika terjadi penurunan penerimaan pajak akan membuat defisit anggaran negara yang menandakan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan

keuangan publik menjadi lebih baik untuk mendukung kebijakan fiskal pajak dan pengeluaran.

### **5. Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana ketika terjadi peningkatan pengeluaran maka akan menstimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan pengeluaran karena dibutuhkan peran pemerintah untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi tersebut.

Wagner mengemukakan Hukum pertumbuhan pengeluaran dimana dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat dan hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat (Mangkoesobroto, 2001).

Dumairy (1996) menyatakan bahwa identitas keseimbangan pendapatan nasional menjadi sebuah sumber legitimasi pandangan kaum *keynesian* akan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sehingga dapat diketahui bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan nasional.

Cheng dan Lai (1997) melakukan penelitian di Korea Selatan dari tahun 1954-1994 yang menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek maupun jangka panjang yang mendukung model pendapatan nasional Keynes dan hukum pertumbuhan pengeluaran Wagner. Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan

oleh penelitian Uzoma dan Nwosu (2018) yang menunjukkan hubungan kausalitas dua arah yang kuat antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria pada jangka pendek dan jangka panjang pada periode tahun 1970-2016.

## **6. Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Penerimaan pajak memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Maganya (2020) menyatakan bahwa adanya hubungan dua arah tersebut menyebabkan pemerintah harus lebih memperhatikan struktur pajak agar dapat lebih efisien sehingga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan dalam hal ini masyarakat harus membayar kepada pemerintah dalam bentuk pajak atas berbagai manfaat yang diterima dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Tanzania.

Handoko (2019) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi dimana perubahan pada penerimaan pajak akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam artian ketika terjadi peningkatan atau penurunan pada penerimaan pajak akan meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pemerintah harus berkontribusi dengan membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi, investasi, dan konsumsi yang nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Adanya peningkatan penetapan pajak pada setiap wajib pajak membawa dampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga menurunkan konsumsi, namun dilain sisi jumlah pajak yang diperoleh pemerintah akan digunakan untuk pembangunan ekonomi secara makro sehingga pendapatan nasional akan meningkat (Sudirman, 2011).

Kebijakan fiskal terhadap perekonomian akan memperluas pasar internal, mengurangi impor yang tidak penting, meniadakan tekanan inflasioner dan merangsang berbagai jenis proyek pembangunan yang diinginkan. Semua itu dapat dilakukan pemerintah dengan salah satunya menetapkan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan (Jhingan, 2016).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Taha dan Loganathan (2008) yang meneliti hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Malaysia dengan menggunakan data tahunan pada periode 1970-2006 dengan metode *Granger causality test* serta menggunakan model VAR. Hasil uji granger menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah yang kuat antara variabel penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Malaysia.

Ayo et al. (2012) melakukan penelitian hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan inflasi di Nigeria pada periode tahun 1970-2010 dengan model VAR setelah dilakukan uji kointegrasi maka didapatkan hasil terdapat kointegrasi antar variabel sehingga dilanjutkan dengan model VECM dan uji kausalitas granger. Hasil uji kausalitas *granger* menunjukkan pada jangka panjang dan jangka pendek terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah di Nigeria.

Roşoiu (2015) meneliti hubungan kausalitas antara penerimaan negara yang diukur dengan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Romania pada periode tahun 1998-2014, metode yang digunakan *granger causality test* dan model VAR dimana hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi serta terdapat hubungan kausalitas satu arah dari penerimaan pajak kepada pengeluaran pemerintah di Romania.

Attari et al. (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan kausalitas penerimaan pajak, pasar saham, dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan dengan menggunakan data kuartal dari juli 2003 – juli 2012. Alat analisis yang

digunakan *granger causality test* dengan menggunakan model Var yang sudah terkointegrasi sehingga dilanjutkan dengan model VECM. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara variabel penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi, serta terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pasar saham kepada penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan.

Al-Zeaud (2015) meneliti hubungan kausalitas kebijakan fiskal di Jordania dimana dalam hal ini variabel yang digunakan adalah penerimaan negara yang diukur dengan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan data time series pada periode tahun 1990-2011, metode penelitian ini menggunakan uji kausalitas granger dan model VECM, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah pada jangka pendek antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Jordania, hal ini mendukung *fiscal synchronization hypothesis* dimana dalam hal ini secara berkelanjutan besaran pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi penerimaan pajak akibat penyesuaian anggaran dari pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pemerintah.

**Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
1	<i>Causality Between Tax Revenue And Government Spending In Malaysia</i> <b>Roshaiza Taha, Nanthakumar Loganathan (2008)</b>	Mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Malaysia pada periode tahun 1970-2006.	Hasil uji granger menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah yang kuat antara variabel penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Malaysia.
2	<i>A Trivariate Causality Test among Economic Growth, Government Expenditure and Inflation Rate: Evidence from Nigeria</i> Ayo Olaiya <b>Nwosa Philip, Ifeakachukwu, Amassoma Ditimi (2012)</b>	Mengetahui hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan inflasi di Nigeria pada periode tahun 1970-2010.	Hasil uji kausalitas <i>granger</i> menunjukkan pada jangka panjang dan jangka pendek terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah di Nigeria.
3	<i>The impact of the government revenues and expenditures on the economic growth</i> <b>Iulia Roşoiu (2015)</b>	Mengetahui hubungan kausalitas penerimaan negara, pengeluaran negara, dan pertumbuhan ekonomi di Romania pada periode tahun 1998-2014.	Hasil model PVAR dan uji kausalitas Granger menunjukkan terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi serta terdapat hubungan kausalitas satu arah dari penerimaan pajak kepada pengeluaran pemerintah di Romania.

4	<p><i>Tax Revenue, Stock Market and Economic Growth of Pakistan</i>  <b>Muhammad Irfan Javaid Attari, Roshaliza Taha, Muhammad Imran Farooq (2014)</b></p>	<p>Mengetahui hubungan kausalitas penerimaan pajak, pasar saham, dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan pada periode penelitian tahun 2003-2012.</p>	<p>Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Pakistan, hanya terdapat hubungan kausalitas searah dari pasar saham kepada penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.</p>
5	<p><i>The Causal Relationship between Government Revenue and Expenditure in Jordan</i>  <b>H. A. Al-Zeaud (2015)</b></p>	<p>Mengetahui hubungan kausalitas penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Jordania pada periode tahun 1990-2011.</p>	<p>Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Jordania, hal ini mendukung <i>fiscal synchronization hypothesis</i> dimana dalam hal ini secara berkelanjutan besaran pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi penerimaan pajak akibat penyesuaian anggaran dari pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pemerintah.</p>

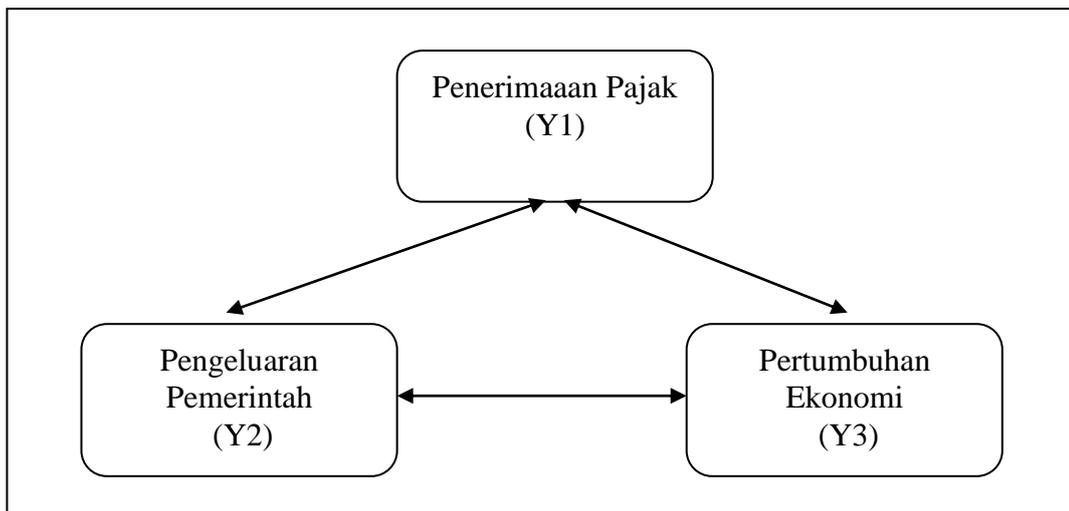
### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah keterkaitan maupun hubungan antara variabel yang diteliti yang diuraikan pada kajian teori di atas. Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, variabel independennya yaitu Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi. Karena dalam penelitian ini terdapat hubungan dua arah antara variabel-variabel independen tersebut.

Penerimaan pajak memiliki hubungan dua arah dengan pengeluaran pemerintah dimana jika penerimaan pajak mengalami peningkatan maka pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan berbagai fasilitas dan subsidi untuk masyarakat, sedangkan jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan pemerintah membutuhkan pembiayaan atas pengeluaran yang dilakukan dimana salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dua arah dengan pertumbuhan ekonomi dimana jika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk menstimulus perekonomian berupa subsidi sehingga menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sedangkan jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pemerintah akan meningkatkan pengeluaran untuk membangun berbagai fasilitas penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Penerimaan pajak memiliki hubungan dua arah dengan pertumbuhan ekonomi

karena jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak, sedangkan jika terjadi peningkatan pajak maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena penerimaan tersebut digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi dan menstabilkan perekonomian.

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan pajak (Y1), pengeluaran pemerintah (Y2), dan pertumbuhan ekonomi (Y3) memiliki hubungan dua arah. Berdasarkan penjelasan diatas maka secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2.5: Kerangka Konseptual Hubungan Antara Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi**

#### **D. Hipotesis**

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga terdapat kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Diduga terdapat kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Diduga terdapat kausalitas antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan model VECM, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukkan terdapat hubungan kausalitas antara variabel penerimaan pajak dengan variabel pengeluaran pemerintah sehingga ketika terjadi peningkatan atau penurunan variabel penerimaan pajak akan berpengaruh kepada variabel pengeluaran pemerintah dan peningkatan atau penurunan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh kepada variabel penerimaan pajak.
2. Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel pengeluaran pemerintah dengan variabel pertumbuhan ekonomi, namun terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi kepada variabel pengeluaran pemerintah sehingga ketika terjadi peningkatan atau penurunan variabel pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh kepada variabel pengeluaran pemerintah, peningkatan atau penurunan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh kepada variabel pertumbuhan ekonomi.
3. Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel penerimaan pajak dengan variabel pertumbuhan ekonomi, namun terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi kepada variabel penerimaan pajak sehingga ketika terjadi peningkatan atau penurunan variabel pertumbuhan

ekonomi berpengaruh pada kepada variabel penerimaan pajak, peningkatan atau penurunan variabel penerimaan pajak tidak berpengaruh kepada variabel pertumbuhan ekonomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang kausalitas penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka Peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu merumuskan peraturan yang lebih ketat, memperhatikan penegakan peraturan, dan transparansi informasi dalam pemungutan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi sumber terbesar penyumbang dana untuk pengeluaran pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan, menghindari penggelapan pajak dan *free rider* dalam masyarakat.
2. Pemerintah perlu memilih dan mengawasi kebijakan mana yang perlu dilaksanakan dalam penggunaan pengeluaran pemerintah sehingga kebijakan yang dipilih akan membawa dampak besar bagi perekonomian dan masyarakat, tidak merugikan pemerintah akibat pengeluaran yang tidak tepat, dan tidak terjadi tindak penyelewengan dana pengeluaran yang sudah ditetapkan.
3. Pemerintah perlu melakukan pengeluaran guna membangun berbagai infrastruktur potensial yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak dari masyarakat dan adanya pengeluaran pemerintah dalam membangun

infrastruktur potensial akan meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai unit usaha yang mengikuti pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zeaud, H. A. 2015. "The Causal Relationship between Government Revenue and Expenditure in Jordan." *International Journal of Management and Business Research* 5 (2): 117–27. <https://doi.org/10.1515/ethemes-2014-0009>.
- Amri, Khairul. 2017. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8 Provinsi Di Sumatera." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)* 1 (1): 1–11.
- Amri, Khairul, and Nazamuddin. 2018. "Is There Causality Relationship Between Export And Employment: A Time Series Data Evidence From Indonesia." *International Journal Of Academic Research Economics And Management Sciences* 7 (2): 86–99.
- Amri, Khairul, Nazamuddin, Raja Masbar, and Hasdi Aimon. 2019. "Is There a Causality Relationship between Local Tax Revenue and Regional Economic Growth? A Panel Data Evidence from Indonesia." *Regional Science Inquiry* 11 (1): 73–84.
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika, Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Ayo, Olaiya, Nwosa Philip Ifeakachukwu, and Amassoma Ditimi. 2012. "A Trivariate Causality Test among Economic Growth , Government Expenditure and Inflation Rate : Evidence From" 3 (1): 65–72.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W N Azman-saini, and M Azali. 2000. "Testing for Causality Between Taxation and Government Spending : An Application of Toda-Yamamoto Approach." *Journal of Socio-Science & Humanity* 8 (1): 45–50.
- Bailey, Stephen J. 1995. "Theories of Public Sector Growth." *Public Sector Economics*, 46–61. [https://doi.org/10.1007/978-1-349-88016-4\\_3](https://doi.org/10.1007/978-1-349-88016-4_3).
- Cheng, Benjamin, and Tin Lai. 1997. "Government Expenditures and Economic Growth in South Korea: A VAR Approach." *Journal of Economic Development* 22 (1): 11–24.
- Dalton, Hugh. 2003. *Principles of Public Finance*. Psychology Press.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Edited by Yati Sumiharti. Jakarta: Erlangga.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar*. 1st ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- . 2016. *Analisis Ekonometrika Time Series*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gujarai, Damodar. 2011. *Econometrics by Example*. Palgrave Macmillan.
- Handoko, Rudi. 2019. "Tax Revenue and Economic Activity: Seasonality, Cointegration and Causality Analysis." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 3 (1): 1–17. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.401>.
- Henry Faizal Noor. 2015. *Ekonomi Publik*. Edited by Paramita. 2nd ed. Jakarta: Indeks.
- I wayan Sudirman. 2011. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Inchauspe, Julian, Moch Abdul Kobir, and Garry MacDonald. 2020. "Wagner's Law and the Dynamics of Government Spending in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 0 (0): 1–22.